



**RELEVANSI MADILOG DALAM MENYOROTI
KEMBALINYA PERAN GANDA MILITER DI INDONESIA:
STUDI ATAS PEMBENTUKAN UU NO. 3 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 34 TAHUN 2004
TENTANG TNI**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Ilmu Filsafat**

Oleh

JOHAKIM REDA LANGODAY

NPM: 22.75.7328

INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO

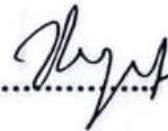
2026

LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL

1. Nama : Johakim Reda Langoday
2. NPM : 22.75.7328
3. Judul : Relevansi *Madilog* dalam Menyoroti Kembalinya Peran Ganda Militer di Indonesia: Studi atas Pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI

4. Pembimbing:

1. Dr. Bernardus Subang Hayong
(Penanggung Jawab)

:

2. Prof. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

:

- 3 Dr. Mathias Daven

:

5. Tanggal diterima

: 15 April 2025

6. Mengesahkan
Wakil Rektor 1



Dr. Yosef Keladu

7. Mengetahui
Rektor IPTK Ledalero



Prof. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian
dari Syarat-syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Ilmu Filsafat

Pada

23 Mei 2026

Mengesahkan

INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO



Rektor

Prof. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Bernardus Subang Hayong : 
2. Prof. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung : 
3. Dr. Mathias Daven : 

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Johakim Reda Langoday

NPM : 22.75.7328

Menyatakan bahwa skripsi berjudul *RELEVANSI MADILOG DALAM MENYOROTI KEMBALINYA PERAN GANDA MILITER DI INDONESIA: STUDI ATAS PEMBENTUKAN UU NO. 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI* merupakan murni hasil karya ilmiah saya sendiri, bukan hasil plagiasi dari karya pihak lain, baik individu maupun lembaga. Seluruh sumber yang berasal dari karya ilmiah orang lain atau lembaga lain telah dikutip secara tepat dan dicantumkan dalam catatan kaki serta daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti adanya kecurangan atau penyimpangan dalam bentuk plagiasi, penjiplakan, atau sejenisnya dalam karya ilmiah ini, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan skripsi serta pencabutan gelar yang diperoleh berdasarkan skripsi tersebut.

Ledalero, 30 April 2026

Yang menyatakan



Johakim Reda Langoday

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Johakim Reda Langoday

NPM : 22.75.7328

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero **Hak Bebas Royalti (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul:

Relevansi *Madilog* dalam Menyoroti Kembalinya Peran Ganda Militer di Indonesia: Studi Atas Pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI

beserta perangkat yang menyertainya (jika diperlukan). Dengan pemberian hak non-eksklusif ini, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero berwenang untuk menyimpan, mengalihmediakan atau mengubah format, mengelola dalam bentuk basis data (database), merawat, serta mempublikasikan skripsi saya, dengan tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sekaligus pemegang hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Ledalero-Maumere

Pada tanggal : 30 April 2026

Yang menyatakan



Johakim Reda Langoday

KATA PENGANTAR

Revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 sebagai Perubahan atas Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia memunculkan penolakan yang luas dari masyarakat, organisasi sipil, dan perguruan tinggi. Penolakan ini menyoroti proses pembentukannya yang bermasalah dan substansi perubahan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 yang berdampak buruk terhadap relasi sipil-militer di Indonesia. Kehadiran undang-undang ini memberikan tempat bagi kembalinya peran ganda militer yang lebih luas karena berpotensi mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer. Hal ini tentu merupakan kemunduran demokrasi di Indonesia yang telah diperjuangkan dalam reformasi 1998. Skripsi ini, berjudul “Relevansi *Madilog* dalam Menyoroti Kembalinya Peran Ganda Militer di Indonesia: Studi Atas Pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI”, bertujuan untuk mengkaji proses revisi undang-undang tersebut melalui lensa *Madilog* (materialisme, dialektika, dan logika) yang dikembangkan oleh Tan Malaka, seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Melalui pendekatan *Madilog*, penulis yakin bahwa pembentukan suatu aturan hukum dapat dilaksanakan dengan baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa revisi undang-undang ini sungguh bermasalah mulai dari proses dan substansi perubahan di dalamnya. DPR dan pemerintah tidak memperhatikan kondisi empiris dalam sejarah bangsa Indonesia berhadapan dengan dampak buruk dwi-fungsi ABRI terhadap kehidupan bernegara dan bermasyarakat (materialisme). Mereka juga tidak melibatkan masyarakat sipil dalam pembentukannya. Tidak ada transparansi dalam proses penyusunannya yang membuat masyarakat merasa tidak diperhitungkan. Semua masukan dan kritik dari berbagai pihak juga tidak mendapatkan perhatian yang berarti dari para pihak yang terlibat dalam proses legislasi (dialektika). Lebih lanjut, substansi perubahan dalam revisi ini tidak menjawab kebutuhan terkait tantangan zaman. Keinginan untuk meningkatkan profesionalisme TNI justru nyatanya semakin mengurangi profesionalisme itu. Revisi ini sangat tidak rasional karena

mengembalikan peran ganda militer di Indonesia. Padahal yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah semakin menjauhkan militer dalam ranah sipil. Militer harus berada di tempat yang sebenarnya (logika).

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan tuntunan-Nya selama penyusunan skripsi ini. Terimakasih kepada Civitas Akademika Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero yang telah memberikan dukungan ilmiah, sarana prasarana, serta suasana akademik yang kondusif. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada dosen pembimbing, Dr. Bernardus Subang Hayong atas bimbingan dan saran kritis yang telah memperkaya pemikiran penulis. Terima kasih kepada Prof. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengoreksi demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada Seminari Tinggi Interdiocesan St. Petrus Ritapiret, tempat penulis memperoleh begitu banyak pendampingan untuk hidup yang semakin bermakna di tengah dunia. Terima kasih berlimpah kepada Mama Sin Joris, Kakak Clara Langoday, Kakak Jeffry Langoday dan Adik Semi Langoday serta semua keluarga yang selalu sabar dan tulus mendukung di saat ‘terjatuh’. Terima kasih juga kepada teman-teman Fortezza 66 dan kos-kosan Wairpelit yang memberikan motivasi dan dukungan moral selama proses penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, baik dalam cakupan pembahasan maupun kedalaman analisis. Kendati demikian, penulis berharap karya ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses legislasi agar lebih memperhatikan kepentingan masyarakat. Semoga pembahasan yang disajikan dapat memberikan manfaat, memperluas horizon keilmuan, serta memperkaya diskursus relasi-militer.

Akhir kata, penulis memohon kritik dan saran konstruktif demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga segala bentuk bantuan yang diberikan memperoleh balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Ledalero, 30 April 2026

Penulis

ABSTRAK

Johakim Reda Langoday, 22.75.7328. *Relevansi Madilog dalam Menyoroti Kembalinya Peran Ganda Militer di Indonesia: Studi Atas Pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI*. Skripsi. Program Sarjana, Program Studi Ilmu Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2026.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi konsep Madilog (materialisme, dialektika, dan logika) yang diperkenalkan oleh Tan Malaka sebagai dasar pemikiran bagi para pemangku kepentingan dalam proses legislasi. Kerangka tersebut dimanfaatkan untuk mengkaji polemik terkait revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, yang memicu kritik serta penolakan dari berbagai kalangan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Keterlibatan militer dalam ranah sipil dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan demokrasi, terutama karena dapat mengaburkan batas antara otoritas sipil dan militer serta melemahkan prinsip supremasi sipil. Dalam konteks revisi tersebut, ditemukan permasalahan dalam proses legislasi yang kurang transparan dan tidak partisipatif, disertai substansi perubahan yang membuka peluang perluasan peran TNI di luar fungsi pertahanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi undang-undang ini mengandung persoalan mendasar, baik dari segi prosedural maupun substansial, yang berpotensi melemahkan supremasi sipil. Dalam perspektif Madilog, proses pembentukan regulasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan yang objektif, dialektis, dan logis. DPR dan pemerintah dinilai belum secara optimal mempertimbangkan realitas sosial serta aspirasi publik. Selain itu, perluasan peran TNI di luar bidang pertahanan yang berpotensi menghidupkan kembali peran ganda militer dinilai tidak rasional di tengah tuntutan peningkatan profesionalisme TNI. Dengan demikian, Madilog tetap relevan sebagai instrumen analisis kritis dalam menilai pembentukan peraturan perundang-undangan agar tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kata kunci: *Madilog*, peran ganda militer, TNI, relasi sipil-militer, demokrasi.

ABSTRACT

Johakim Reda Langoday, 22.75.7328. *The Relevance of Madilog in Highlighting the Return of the Dual Role of the Military in Indonesia: A Study of the Formation of Law No. 3 of 2025 Concerning Amendments to Law No. 34 of 2004 Concerning the TNI*. Thesis. Undergraduate Programme, Philosophy Study Programme, Ledalero Institute of Philosophy and Creative Technology, 2026.

This study aims to analyze the relevance of the *Madilog* concept (materialism, dialectics, and logic) introduced by Tan Malaka as a basis for thinking for stakeholders in the legislative process. This framework is used to examine the polemics related to the revision of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces into Law Number 3 of 2025, which has sparked criticism and rejection from various groups.

This study uses a qualitative method with a literature study approach. Military involvement in the civilian sphere is considered to have the potential to have a negative impact on democratic life, primarily because it can blur the boundaries between civilian and military authority and weaken the principle of civilian supremacy. In the context of the revision, problems were found in the legislative process that was less transparent and participatory, accompanied by the substance of the changes that opened up opportunities to expand the role of the TNI beyond defense functions.

The results of the study indicate that the revision of this law contains fundamental problems, both procedurally and substantively, which have the potential to weaken civilian supremacy. From a *Madilog* perspective, the process of formulating the regulation does not fully reflect an objective, dialectical, and logical approach. The DPR and the government are considered to have not optimally considered social realities and public aspirations. Furthermore, expanding the TNI's role beyond defense, which could potentially revive the military's dual role, is considered irrational amidst demands for increased professionalism. Therefore, *Madilog* remains relevant as a critical analytical tool for assessing the formation of legislation to ensure it remains oriented toward the public interest.

Keywords: *Madilog*, dual role of the military, TNI, civil-military relations, democracy.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Manfaat Penulisan.....	4
1.5 Metode Penulisan	5
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II TAN MALAKA DAN <i>MADILOG</i>	7
2.1 Biografi Tan Malaka	7
2.1.1 Latar Belakang Keluarga dan Kehidupan Awal	7
2.1.2 Pendidikan dan Pemikiran Awal	9
2.1.3 Aktivitas Politik dan Pergerakan Internasional	13

2.1.4 Peran dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia	17
2.2 Pemikiran Tan Malaka dalam <i>Madilog</i>	21
2.2.1 Latar Belakang Penulisan <i>Madilog</i>	21
2.2.2 Struktur <i>Madilog</i>	23
2.2.3 Materialisme, Dialektika, dan Logika	25
2.2.3.1 Materialisme.....	25
2.2.3.2 Dialektika.....	28
2.2.3.3 Logika.....	30
2.3 Akhir Hidup Tan Malaka	31
2.4 Relevansi Pemikiran dan Perjuangan Tan Malaka dalam Sejarah	
Intelektual Indonesia	32

BAB III DWI-FUNGSI ABRI DAN KONTEKS SOSIO-POLITIK REVISI

UU TNI	34
3.1 Sejarah Dwi-Fungsi ABRI dan Reformasi Militer di Indonesia.....	34
3.1.1 Sejarah Dwi-Fungsi ABRI	34
3.1.2 Reformasi 1998: Tuntutan Penghapusan Dwi-Fungsi ABRI	40
3.2 Latar Belakang Revisi UU TNI.....	42
3.2.1 Adaptasi Perkembangan Zaman dan Kebutuhan Nasional	42
3.2.2 Motif Politik Terselubung.....	45
3.3 Proses Pembentukan dan Poin-Poin Perubahan Utama Revisi UU TNI	
.....	48
3.3.1 Proses Pembentukan Revisi UU TNI	48
3.3.2 Poin-Poin Perubahan Utama Revisi UU TNI	52
3.4 Tanggapan Pemerintah dan Reaksi Publik terhadap Revisi UU TNI ..	54
3.4.1 Tanggapan Pemerintah terhadap Revisi UU TNI.....	54
3.4.2 Reaksi Publik terhadap Revisi UU TNI	57

3.5 Dampak Revisi UU TNI	61
3.5.1 Mengancam Supremasi Sipil dan Demokrasi	61
3.5.2 Melemahkan Profesionalisme Militer	62
3.5.3 Isu Hak Asasi Manusia dan Akuntabilitas	63
3.6 Sintesis Analitis atas Dinamika Revisi UU TNI dan Relasi Sipil–Militer	64
BAB IV RELEVANSI <i>MADILOG</i> DALAM ANALISIS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TNI.....	67
4.1 <i>Madilog</i> Tan Malaka dan Pembentukan Undang-Undang	67
4.1.1 Relevansi <i>Madilog</i> dalam Proses Pembentukan Undang-Undang.....	67
4.1.2 Implementasi <i>Madilog</i> dalam Praktik Legislasi.....	72
4.1.3 Implikasi dari Penggunaan <i>Madilog</i> dalam Pembentukan Undang-Undang	76
4.2 Analisis Pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 Berdasarkan Konsep <i>Madilog</i>	79
4.3 Pembentukan UU No. 3 Tahun 2025: Pendekatan Politis bukan Ilmiah	86
4.4 Tawaran Pemikiran Tan Malaka terhadap Reformasi Militer dan Demokrasi Indonesia	89
BAB V PENUTUP.....	93
5.1 Kesimpulan.....	93
5.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	98